

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah dari perekonomian dalam suatu negara adalah masalah pertumbuhan ekonomi dengan jangka waktu yang cukup lama. Perkembangan perekonomian diukur melalui pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari periode satu dengan periode berikutnya. Pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan dengan seiring waktu dari periode satu ke periode seterusnya dengan menghasilkan suatu barang dan jasa karena faktor produksi yang akan selalu mengalami kenaikan dalam jumlah maupun kualitas barang dan jasa tersebut.

Dalam analisis makro, menurut Sukirno (2004) dalam suatu negara atau daerah yang untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi menggunakan perkembangan pendapatan nasional riil. Didalam teori pertumbuhan ekonomi neo klasik dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi (bila dalam kawasan daerah maka mengukurnya dengan pertumbuhan PDRB) tergantung pada beberapa perkembangan faktor-faktor produksinya, seperti : modal, tenaga kerja, dan teknologi (Sukirno, 1994).

Pembangunan daerah adalah salah satu bagian yang meliputi keseluruhan dari pembangunan nasional yang dilaksanakan menurut asas otonomi daerah dan aturan sumber daya nasional yang telah memberikan peluang untuk demokrasi dan kinerja daerah yang ditingkatkan menuju masyarakat madani yang lepas dari sifat nepotisme, persekongkolan (kolusi) dan korupsi.

Pelaksanaan pemerintah daerah yang bertujuan untuk menjadi sub sistem negara guna meningkatkan daya dan hasil pelaksanaan dan pelayanan masyarakat.

Pembangunan ekonomi ini memiliki tujuan untuk menaikkan pendapatan nasional riil dan untuk menaikkan produktivitas. Ada tiga sifat penting yang dimiliki oleh pembangunan ekonomi, ialah (Hasibuan, 2014) :

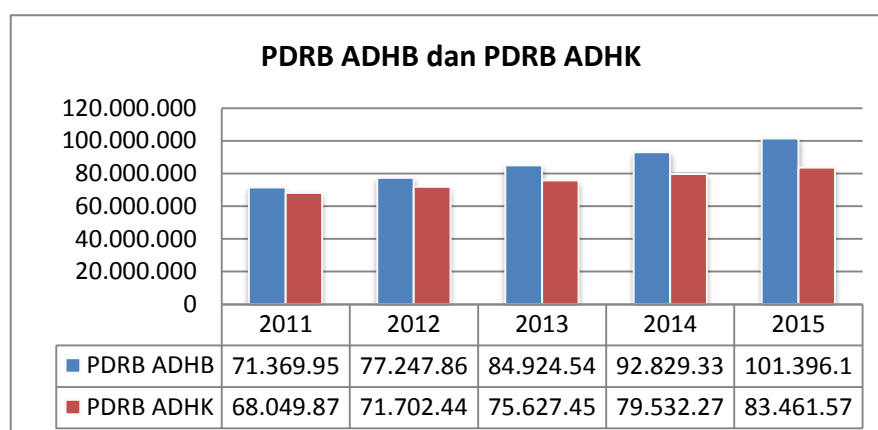
- a. Suatu proses yang dimana terjadi perubahan secara terus menerus.
- b. Suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
- c. Agar pembangunan dapat dilakukan untuk jangka waktu yang panjang maka kenaikan pendapatan per kapita/ *income per capita* haruslah terus menerus.

Menurut Undang-undang No. 32/ 2004 yang berisi tentang “Pelimpahan sebagian wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam rangka pembangunan nasional negara Republik Indonesia” dan Undang-undang No. 33/ 2004 yang berisi tentang “Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah”, diharapkan dapat memberikan motivasi untuk meningkatkan kreatifitas dan inisiatif untuk lebih menggali dan meningkatkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki masing-masing daerah serta dilaksanakan sesuai dengan aturan otonomi daerah supaya pembangunan setiap daerah lebih maksimal lagi dalam menggapai prioritas dan potensi daerah. Pertumbuhan ekonomi ialah sebagian besar dari suatu perkembangan kesejahteraan masyarakat yang dikur dengan *Produk Domestic Regional*

Bruto per capita (PDRB per kapita) (Zaris, 1987). Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang dapat dilihat dari tingginya nilai PDRB berarti daerah tersebut mengalami kenaikan perekonomian yang berkesinambungan. Kabupaten/Kota sebagai daerah yang berdiri sendiri bertindak sebagai alat, sedangkan bagian pemerintah sebagai koordinator yang memegang kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan kepentingan masyarakat menurut prinsip yang terbuka dan keikutsertaan masyarakat serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan suatu daerah. Pembangunan daerah diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta pembangunannya berlangsung secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam menaikkan perekonomian masyarakat.

PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2015 (miliar rupiah)



Sumber : BPS, DIY Dalam Angka 2016

Gambar 1.1

Pada gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun 2011 yang PDRB atas dasar harga konstannya 68.049.874 miliar rupiah hingga 2015 yang PDRB atas dasar harga konstannya 101.396.117 miliar rupiah. Dalam teori ekonomi makro, dilihat dari sisi pengeluaran pendapatan regional bruto ialah berbagai variabel yang ditambahkan yang didalamnya salah satunya adalah investasi.

Investasi juga ada jenisnya yaitu investasi asing dan investasi dalam negeri. Investasi yang ada didaerah terdiri dari investasi pemerintahan dan investasi swasta yang asalnya dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Sedangkan investasi swastapun berasal dari investasi asing atau luar negeri. Investasi pemerintah digunakan untuk mempersiapkan barang-barang publik. Untuk menghitung besarnya investasi pemerintah dengan menghitung selisih antara total anggaran pemerintah dengan belanjaan rutin.

Investasi juga adalah salah satu faktor yang mempengaruhi naiknya pertumbuhan ekonomi. Karena jika dalam suatu daerah banyak perusahaan yang mendapatkan investasi, maka perusahaan tersebut akan memperbanyak produksi dan secara otomatis agar produksi tersebut berjalan dengan lancar maka harus diimbangi dengan tenaga kerja yang cukup, sehingga perusahaan akan banyak memberikan lapangan pekerjaan bagi para angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan.

Tabel 1.1
Realisasi PMDN dan PMA Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2015

Kab/ Kota	PMDN		PMA	
	Jumlah Proyek	Realisasi (Juta Rp.)	Jumlah Proyek	Realisasi (Juta Rp.)
Kulon Progo	8	494,698,30	4	562,480,88
Bantul	16	268,006,19	39	343,256,50
Gunung Kidul	9	35,502,55	5	136,083,21
Sleman	55	1,431,044,98	57	3,009,698,00
Yogyakarta	47	1,722,410,41	34	3,220,222,18
TOTAL	135	3,951,662,45	139	7,271,740,78

Sumber : BPS, DIY Dalam Angka 2016

Dapat dilihat dari tabel 1.1 diatas bahwa pada tahun 2015 yang lalu penanaman modal dalam negeri untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dengan total 3,951,662,45 yang jumlah proyeknya sebesar 135. Sedangkan penanaman modal asing untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dengan total 7,271,740,78 yang jumlah proyeknya sebesar 139.

Selain keuangan daerah dan investasi tidaklah cukup untuk membangun model pembangunan, sehingga dibutuhkannya sumber daya manusia. Memiliki masyarakat yang ikut berpartisipasi dengan aktif tentunya akan meningkatkan tumbuhnya pembangunan daerah karena memiliki rasa kepemilikan terhadap daerahnya tersebut. Dalam pelaksanaan pembangunan maka diperlukannya sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang baik dan kuantitas permintaan tenaga kerjanya pun juga terpenuhi.

Tenaga kerja adalah salah satu faktor yang mempengaruhi output suatu daerah. Didalam tenaga kerja juga terdapat angkatan kerja yang terbentuk dari jumlah penduduk yang banyak. Tetapi jumlah penduduk yang banyak justru akan mengkhawatirkan untuk efek buruk pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan penduduk yang cepat akan menambah masalah keterlambatan dan prospek pembangunan akan menjadi jauh (Todaro, 2004). Tetapi jika jumlah penduduk yang mencukupi dengan pendidikan yang tinggi dan mempunyai skill sehingga pertumbuhan ekonomi akan terdorong dan tentunya dengan jumlah penduduk yang usianya menginjak usia produktif maka jumlah angkatan kerja pun akan meningkat dan akhirnya akan meningkatkan produksi output suatu wilayah.

Tabel 1.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran
Terbuka Menurut Provinsi di Pulau Jawa (%)
Tahun 2013-2015

Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka				
	2013	2014		2015	
	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
DKI Jakarta	8,03	9,84	8,47	8,36	7,23
Jawa Barat	9,16	8,66	8,45	8,40	8,72
Jawa Tengah	6,01	5,45	5,68	5,31	4,99
DIY	3,24	2,16	3,33	4,07	4,07
Jawa Timur	4,30	4,02	4,19	4,31	4,47
Banten	9,54	9,87	9,07	8,58	9,55
Nasional	6,17	5,70	5,94	5,81	6,18

Sumber : BPS, DIY Dalam Angka 2016

Berikut pada tabel 1.2 adalah data dari jumlah angkatan kerja per provinsi di pulau jawa. Pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta memang tidak begitu tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain. Dari tahun 2013-2015 tingkat pengangguran yang paling tinggi di pulau jawa adalah provinsi

Banten 9,54% pada tahun 2013 dan hingga 2015 tetap yang paling tinggi dengan angka 9,55%. Sedangkan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki angka tingkat pengangguran paling rendah di pulau jawa.

Tabel 1.3
Jumlah Angkatan Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2015

Kabupaten/ Kota	Angkatan Kerja	
	Bekerja	Pengangguran
Kulon Progo	232.190	8.966
Bantul	495.235	15.309
Gunung Kidul	386.458	11.526
Sleman	567.286	32.167
Yogyakarta	210.049	12.277

Sumber : BPS, DIY Dalam Angka 2016

Walaupun pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk yang rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada dipulau jawa, akan tetapi itu tidak akan merubah begitu cepat naiknya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena pertumbuhan ekonomi jika ingin mengalami kenaikan yang cepat maka membutuhkan tenaga kerja yang aktif dan dapat berpartisipasi dengan baik pula.

Selain investasi dan tingkat pengangguran yang mempengaruhi naiknya pertumbuhan ekonomi yaitu pendapatan asli suatu daerah. Dibawah ini terdapat tabel 1.3 yaitu komposisi penerimaan pendapatan asli daerah dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendapatan asli daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta ini dari tahun 2011-2016 mengalami kenaikan yang berkelanjutan. Pada tahun 2011 PAD Daerah Istimewa Yogyakarta hanya Rp. 700.339.192 dan mengalami kenaikan hingga tahun 2015 Rp. 1.453.213.231.

Artinya bahwa pemerintah daerah yang telah melakukan penggalian daerah telah mencapai hasil yang baik.

Tabel 1.4
Komposisi Penerimaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2011-2015

Tahun	Sisa Tahun Lalu (Rp.)	%	PAD (Rp.)	%	Dana Perimbangan (Rp.)	%
2011	184.394.542	90,6	700.339.192	49,3	714.542.343	50,3
2012	191.724.892	86,6	800.156.498	41,3	850.513.085	3,8
2013	190.048.265	88,9	1.014.089.544	44,3	961.190.992	42,0
2014	280.821.707	100	1.233.738.562	39,8	1.038.621.026	33,5
2015	281.988.867	100	1.453.213.231	42,4	1.046.869.045	30,6

Sumber : BPS, DIY Dalam Angka 2011-2016

Dari hasil uraian diatas, terdapat investasi, pendapatan asli daerah dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila dari setiap variabel mengalami peningkatan atau penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi maka dalam hal ini disebut PDRB (*Product Domestic Regional Bruto*). Kejadian seperti diperlukannya suatu penelitian yang dapat memberikan rekomendasi terhadap kelangsungan pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini, penelitian ini diangkat melalui judul : **“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengangguran dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2015”**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah sehingga tidak terjadi penyimpangan dari tujuan karya tulis penelitian ini, dan permasalahan yang diangkat terbatas pada :

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2015.
2. Analisis data menggunakan variabel dependen dan variabel independen.
 - a) Variabel dependen : PDRB
 - b) Variabel independen : investasi, pendapatan asli daerah dan tingkat pengangguran.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Penelitian yang sudah dibahas dilatar belakang sesuai dengan rumusan masalahnya, yaitu :

1. Bagaimana pengaruh tingkat investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2015.
2. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2015.
3. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2015.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini memiliki manfaat untuk berbagai pihak, yaitu :

1. Kegunaan penelitian ini untuk pengembangan ilmu, terutama bagi penulis dapat menambah wawasan tentang permasalahan-permasalahan ekonomi, sebagai konsep dan penerapan yang telah didapat selama masa kuliah.
2. Penelitian ini akan bermanfaat bagi pembaca, untuk dijadikan sumber informasi terhadap masalah ekonomi.